

**STUDI KOMPARASI
SAMINISME DENGAN JEAN PAUL SARTRE
TENTANG KEBEBASAN
(Tinjauan Filsafat Sosial)**

Oleh: Restu Trisnova¹

Abstract

The comparative study between Saminism concept and Jean Paul Sartre thought of freedom are: 1) Human freedom, according to Sartre, is an absolute freedom. No other rules which are able to determine human either God or other people; 2) The Saminism concept of freedom is an individual freedom. It means every individual as a subject is able to decide their own choice. Every individual as a subject is independent without any outside order; 3) Saminism freedom conveys individual responsibility. It means every person's freedom has individual responsibility. Every doer subject can decide everything based on their interest. Therefore, the freedom and responsibility in Saminism actualizes the Jean Paul Sartre thought of freedom.

Keywords: Saminism, Jean Paul Sartre, Freedom.

A. Pendahuluan

Ajaran Saminisme merupakan sebuah konsep tentang bagaimana manusia harus bertindak dalam kehidupan dunia. Saminisme pertama kali disebarkan di daerah Randublatung (bagian selatan kabupaten Blora) oleh Ki Samin Surosentiko, seorang petani kelas menengah, pada pertengahan 1890-an. Ki Samin Surosentiko kemungkinan dilahirkan pada tahun 1859 di sebuah desa dekat Randublatung. Saminisme berkembang di Blora, Pati, Kudus, Rembang, dan sekitarnya. Saminisme merupakan perkembangan ajaran Ki Samin Surosentiko pada tahun 1900-an. Ajaran ini berawal dari pergerakan melawan pemerintahan kolonial Belanda. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menjadikan hutan sebagai perusahaan negara (*houtvesterijen*) membuat petani di sekitarnya tidak lagi memiliki akses untuk memanfaatkan hutan

¹ Karyawan PT. Bank BTPN MUR Cabang Muntok, tinggal di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.

yang waktu itu menghidupi mereka. Adanya sistem perekonomian yang memunculkan pajak bagi petani membuat adanya perubahan sosial dalam kehidupan. Para petani tidak lagi mampu menggarap sawah mereka sendiri karena terhalang oleh pajak. Pajak hanya membuat petani menjadi petani garapan (Fauzan, 2005: 80).

Saminiisme lahir sebagai bentuk perlawanan petani terhadap kebijakan pemerintah kolonial di atas. Hanya berselang dua tahun setelah Belanda mengeluarkan pajak semacam itu, Samin Surosentiko memulai dakwah ajarannya di Blora. Munculnya Saminiisme sebetulnya hanya menambah variasi bentuk resistensi pada zamannya, seperti pemberontakan petani. Gerakan ini memilih melakukan perlawanan radikal dengan menarik diri dari kehidupan publik kolonial dan melakukan purifikasi perilaku hidup. Mereka melakukan pemboikotan atas segala aturan kehidupan yang diterapkan kolonial Belanda (Fauzan, 2005: 81).

Pengikut ajaran Samin Surosentiko lebih suka menyebut dirinya dengan masyarakat *Sedulur Sikep* atau *Wong Sikep*. Mereka tidak lagi menggunakan istilah Samin, karena adanya perubahan makna Samin di dalam pemahaman masyarakat sekarang ini. Samin dipahami sebagai yang tidak lumrah, yang merupakan representasi orang-orang dengan tindakan dan ucapan yang "kocak", "konyol", irasional, bodoh, terbelakang, atau bahkan gila. Meski demikian, perubahan identitas di atas tidak merubah keadaan karena pada kenyataannya masyarakat *Sikep* tetap dianggap negatif. Bahkan pemerintah yang mengakui sumbangsih perjuangannya melawan pemerintah kolonial Belanda, juga mengakui "kekonyolan" dan merasa terganggu oleh tindakan masyarakat ini. Masyarakat *Sikep* adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri khusus yang menjadi identitas mereka dalam penampilan sehari-hari, yang berbeda dengan masyarakat lain di sekitarnya. Identitas itu menunjukkan karakter dan perlengkapan mereka yang sesuai dengan ajaran Saminiisme yang mereka pertahankan dari waktu ke waktu terutama oleh kalangan generasi tua. Mereka merasakan kebenaran dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran-ajaran peninggalan Samin Surosentiko sebagai suatu pandangan hidup yang sangat berguna. Perasaan kecewa terhadap berubahnya konsep *kawula gusti* dan perlunya kemerdekaan dari tekanan pemerintah kolonial Belanda kemudian memunculkan hasrat akan internalisasi *gusti* secara sempurna ke dalam diri tiap individu (*kawula*). Inilah tahap "kemurnian" yang diajarkan Samin kepada murid-muridnya (Fauzan, 2005: 86).

Semua aturan hidup pada dasarnya adalah ajaran untuk “tidak menginginkan milik orang lain”. Ajaran Samin secara konseptual menempatkan objek keinginan di dalam diri sendiri. Ketertarikan dan minat tidak ditujukan pada relasi kekuasaan antara diri sendiri dengan orang lain, melainkan dibatasi pada diri sendiri atau pada hal-hal yang sudah menjadi miliknya, sehingga juga menjadi bagian dari dirinya sendiri (Widodo, 1997:35).

Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda merupakan suatu usaha untuk menjadikan manusia bebas. Masyarakat Samin menganggap bahwa manusia diciptakan setara, tidak ada hak untuk mengungguli satu di atas yang lain, sehingga mereka menolak adanya perbedaan status dalam masyarakat dan menolak adanya penjajahan. Mereka tidak mengakui jabatan struktural dan hierarki sosial, yang salah satunya diekspresikan dengan menolak berbahasa *krama* (Jawa halus) sehingga saling menyebut sesamanya dengan panggilan "*sedulur*" (saudara). Begitu pula yang terjadi sekarang ini, penolakan-penolakan masyarakat *Sikep* terhadap simbol-simbol negara merupakan salah satu bentuk aktualisasi kebebasan manusia. Upaya-upaya perlawanan atas hegemoni negara dianggap sebagai bentuk subversif-separatis ataupun antisosial. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat *Sikep*. Bentuk-bentuk perlawanan mereka dengan melaksanakan kehidupannya dengan cara mereka sendiri dianggap oleh pemerintah sangat mengganggu pelaksanaan kehidupan bernegara.

Sikap dan perbuatan warga Samin selalu diikuti bukti-bukti nyata dan konsekuen sesuai dengan ajaran yang diterima. Simbol identitas masyarakat Samin antara lain terlihat pada pakaian dan juga bahasa. Mereka tidak mengenal tingkatan bahasa Jawa, jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa Jawa *ngoko*. Bagi mereka menghormati orang lain tidak dengan bahasa yang digunakan tapi dengan sikap dan perbuatan yang ditunjukkan. Pakaian orang Samin biasanya terdiri atas baju lengan panjang tanpa krah dan berwarna hitam. Laki-laki memakai ikat kepala. Pakaian wanita biasanya adalah kebaya lengan panjang, berkain sebatas di bawah tempurung lutut atau di atas mata kaki. Terbawa oleh sikapnya yang menentang tersebut mereka membuat tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri (Mumfangati, 2004: 47).

Sampai dengan penghujung tahun 1906, Saminisme sebenarnya masih dipandang sebagai sekte agama tertentu yang tidak terlalu membahayakan. Akan tetapi melihat pengikutnya yang dari waktu ke waktu semakin banyak, serta cakupan daerahnya yang

semakin meluas, antara lain Pati, Madiun, Grobogan, Bojonegoro, dan Tuban, lama kelamaan pemerintah kolonial menjadi khawatir. Apalagi ketika kalangan suprastruktur mendengar isu, bahwa 1 Maret 1907 orang-orang Samin akan melakukan pemberontakan, maka kekhawatiran itu pun semakin memuncak. Gerakan Samin kemudian dilarang, orang-orang Samin ditangkap, tidak terkecuali Samin Surosentiko, pemimpin sekaligus pendiri ajaran Saminisme. Ia bersama delapan orang pembantu setianya diasingkan ke Sumatera Barat hingga sampai pada ajalnya (Mirzah, 1989: 50).

Berbicara mengenai keunikan masyarakat Samin beserta segala kontroversinya, kebanyakan penelitian hanya membahas kajian antropologi dan sejarahnya saja. Penulis, melalui tulisan ini ingin mengupas sisi lain dari Saminisme yaitu dengan memberikan suatu pemahaman secara filsafati atas perilaku masyarakat Samin, khususnya melalui perspektif Jean Paul Sartre.

B. Konsep Kebebasan Jean Paul Sartre

1. Kebebasan Manusia dan Faktisitas

Kata “kebebasan” dalam sejarah pemikiran yang dikemukakan oleh berbagai tokoh terus-menerus mengalami perkembangan. Robert K. Woetzel dalam **The Philosophy of Freedom** (1966) mengatakan bahwa masalah kebebasan sudah bukan semata-mata menjadi pembahasan para filsuf tetapi juga para ahli politik, ahli sosial, dan ahli ekonomi (Woetzel dalam Siswanto, 2001:49). Nico Syukur Dister dalam bukunya **Filsafat Kebebasan** (1988) menyebutkan bahwa kata “bebas” pada dirinya sendiri tidaklah jelas artinya. Hal ini dapat dilihat dalam pemakaiannya yang bisa menunjukkan kenyataan yang berbeda-beda, bahkan dapat bertentangan satu sama lain.

Manusia terkutuk bebas. Begitulah pernyataan dari Sartre. Hal ini disebabkan karena manusia tidak memiliki kodrat yang ditanamkan oleh Tuhan. Ateisme Sartre berdampak pada kebebasan manusia (Adian, 2006:167). Manusia sendiri yang menentukan kodratnya tanpa ada pedoman universal yang mendahului setiap pilihan yang diambilnya.

Manusia adalah makhluk berkesadaran, sehingga ia bercirikan kekosongan, berlawanan dengan kepadatan benda-benda. Ia selalu berongga, maka ia pun bebas. Hidup manusia adalah hidup yang selalu terbuka atas berbagai kemungkinan. Manusia bebas

untuk menegasi satu kemungkinan untuk mewujudkan kemungkinan yang lain, sekali lagi tanpa bimbingan pedoman nilai yang mutlak (Adian, 2006:167). Manusia bersifat independen yang mampu menciptakan dirinya, mengadakan dirinya lewat kesadaran. Ia makhluk yang tidak memerlukan sang “pencipta” karena bila manusia tergantung dengan Tuhan, ia bukan makhluk yang bebas. Kreativitasnya akan berhenti karena adanya penentuan dari Tuhan. Bila hidup ditentukan oleh Tuhan maka manusia tidak akan perlu bertanggung jawab atas hidupnya.

Sartre sebagai seorang filsuf yang maklum akan sebutan “eksistensialis” mengatakan bahwa manusia bereksistensi sebagai dirinya. Manusia adalah makhluk bebas, makhluk yang sadar, makhluk yang merdeka untuk diri sendiri. Seperti yang diutarakan oleh Hasan dari pernyataan Sartre bahwa realitas manusia adalah bebas, pada dasarnya dan sepenuhnya bebas (*Human reality is free, basically and completely free*) (Siswanto, 2001:62). Sartre mengutarakan:

“Inilah maksud saya ketika saya mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk mengalami kebebasan. Ia dikutuk karena ia tidak menciptakan dirinya sendiri, meskipun ia bebas melakukannya. Ia dikutuk semenjak manusia dilemparkan ke dalam dunia di mana ia harus bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan” (Sartre, 2002:58).

Tetapi kebebasan Sartre harus berhadapan dengan faktisitas. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius dalam kaitannya dengan kebebasan manusia yang dicitrakan olehnya. Jika kebebasan itu diartikan oleh Sartre, bahwa seseorang itu harus menentukan dirinya sendiri, ini berarti tanpa kegagalan, bahkan sukses pun bukan merupakan hal yang penting terhadap kebebasan itu. Sebagaimana dia katakan, “*success is not important to freedom*”. (Muzairi, 2002: 153). Manusia memang terbentur oleh faktisitas, tetapi menurut pendapat Sartre, manusia tetap bebas. Hal ini bisa ditelusuri dalam konteks “*making himself*” yang dia putuskan berdasarkan kebebasannya, yakni bahwa manusia adalah bebas dalam usaha mengatasi kontingensi-nya.

Faktisitas sebagai struktur “*for self*” diartikan oleh Sartre sebagai “*The for-itself’s necessary connection with the in self*”. Kaitannya dengan hal ini, ada beberapa faktisitas yang tidak dapat ditiadakan, akan tetapi bisa dilupakan sejenak, dimanipulasi, dan

diolahnya, seperti yang tercantum dalam karya *Being and Nothingness* sebagai berikut : (a) *Place* (tempat tinggal), (b) *Past* (masa lampau), (c) *Environment* (lingkungan), (d) *Fellowmen* (di sini termasuk hubungan antarmanusia, dan adanya sesama manusia masing-masing dengan eksistensinya), (e) *Death* (maut) (Muzairi, 2002, 153).

2. Kebebasan Manusia dan Hubungan Antarmanusia

Sartre memandang hubungan dengan orang lain secara pesimis. Tidak ada dasar lain di luar kebebasan individu. Hubungan dengan orang lain menjadi penting agar dapat merealisasikan diri sebagai manusia. Namun bagi Sartre hubungan dengan orang lain merupakan konflik. Manusia, dalam setiap pergaulan, selalu berusaha merendahkan manusia lainnya. Setiap subjek berusaha menjadikan yang lain sebagai objek dan masing-masing subjek berusaha mempertahankan dirinya agar tidak dijadikan objek. Konflik inilah yang menjadi inti dari relasi intersubjektif (Siswanto, 2008: 66). Ada beberapa bentuk relasi wujud antarmanusia antara lain, sikap acuh tak acuh, sikap cinta, sikap benci, dan sikap seksual.

3. Kebebasan Manusia dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kunci dari kebebasan yang ditawarkan oleh Sartre. Kebebasan, tidaklah tanpa tanggung jawab. Sartre mengatakan bahwa kebebasan mengindikasikan adanya tanggung jawab. Artinya, harus ada pengakuan batin "sayalah" pelaku yang mewujudkan situasi, dunia, dan nilai-nilai. Seperti yang diungkapkan olehnya.

“Di sisi lain, apabila Tuhan tidak ada, tidak lagi tersedia nilai-nilai atau imperatif-imperatif moral yang dapat melegitimasi tingkah laku kita. Maka, kita tidak lagi mempunyai dunia nilai, sarana-sarana pembenaran atau dalih untuk membenarkan diri” (Sartre, 2002:58-59).

Dari tanggung jawab ini lahirlah kecemasan, begitu juga dengan keputusan. Rasa cemas yang dirasakan seperti saat kita berjalan di tepi jurang dan menyadari bahwa tidak ada yang menahan kita untuk tidak memilih kemungkinan untuk lompat ke jurang.

Sartre membedakan ketakutan dengan kecemasan. Kecemasan menyatakan kebebasan, sama seperti rasa muak

menyatakan "Ada" (Bertens, 2006:97). Cemas akan suatu hal tidak bisa dihilangkan layaknya benalu yang senantiasa ada dalam kesadaran manusia. Sebaliknya, takut akan suatu hal bisa dihilangkan. Contohnya, saat seseorang takut kedatangan tukang tagih kartu kredit ke rumah, orang tersebut bisa melenyapkan rasa takut tersebut dengan membayar tagihannya. Takut adalah pemahaman nonreflektif atas objek transendental sedangkan cemas adalah pemahaman reflektif tentang diri "saya" sebagai bebas. Saat seseorang keluar akan kodrat kebebasannya otomatis ia akan cemas karena ia sadar penuh bahwa dirinya bertanggung jawab sepenuhnya atas apapun pilihannya (Adian, 2006:168).

Cemas berhadapan dengan masa lalu dan masa depan. Cemas berhadapan dengan masa depan artinya manusia cemas karena sadar bahwa keberadaannya sekarang tidak dapat menentukan tindakannya di masa yang akan datang, apa yang akan dilakukan murni suatu kemungkinan. Cemas berhadapan dengan masa lalu artinya manusia selalu terpisah oleh jurang kekosongan dari tebing kodratnya. Kodrat adalah sesuatu yang telah lewat. Manusia cemas karena dia sadar betul bahwa apapun ia dulunya tak bisa menentukan dirinya sekarang (Adian, 2006:168).

Sartre mengemukakan ada dua cara manusia menangani rasa cemasnya. Pertama, adalah iman yang baik (*good faith*). Artinya, manusia bertanggung jawab penuh atas apa yang ia lakukan/pilih. Ia sadar bahwa pilihannya datang dari dalam dirinya sendiri dan bukan hasil panduan berbagai pedoman yang menuntunnya dari belakang. Kedua adalah iman yang buruk (*bad faith*). Iman yang buruk terjadi saat manusia membekukan dirinya menjadi benda-benda (*être-en-soi*). Secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut: kebebasan erat terkait dengan tanggung jawab. Penolakan terhadap tanggung jawab menjerumuskan manusia pada apa yang oleh Sartre disebut dengan *bad faith*, sedang pengakuan merupakan *good faith*. Manusia yang autentik adalah yang bertanggung jawab, bukan yang melarikan diri (Adian, 2006:169).

C. Konsep Kebebasan dalam Saminisme

Manusia, baik secara orang perseorangan maupun bangsa, merasa terdorong oleh kecenderungan yang tiada habisnya untuk melaksanakan cita-cita diri. Tujuan kecenderungan ini adalah kemerdekaan, otonomi, kedewasaan. Cita-cita kepribadian yang merdeka dan berdiri sendiri itulah yang dimaksudkan dengan kata kebebasan. Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup kita selaku

manusia adalah kepribadian atau kedirian yang sifatnya sedemikian rupa sehingga orangnya bebas dari beraneka ragam alienasi yang menekannya, dan bebas pula untuk kehidupan yang utuh, tak tercela, berdikari, dan kreatif. Kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi kita (Dister, 1988: 47).

Pemahaman yang sama juga bisa dilihat di dalam masyarakat Samin. Cepatnya arus modernisasi, membuat masyarakat Samin merasa bahwa mereka banyak mendapat tekanan dari berbagai pihak. Masyarakat Samin melakukan suatu resistensi atas eksistensinya untuk mendapatkan kebebasan ini.

1. Kebebasan dalam Beragama dan Bertuhan

Aristoteles melihat kebebasan sebagai suatu pilihan. Menjadi bebas, menurut Aristoteles, berarti dapat memilih (Dister, 1988: 82). Begitu juga halnya masyarakat Samin. Mereka merasa berhak menentukan pilihannya sendiri. Dalam konteks Agama, masyarakat Samin ingin melaksanakan sendiri agama yang mereka percayai walaupun mereka mendapatkan tekanan dari pemerintah karena agama yang mereka jalani tidak sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia. Contoh kasus masyarakat Samin di daerah Kudus, mereka memohon kepada bupati untuk mengosongkan kolom agama pada pembuatan KTP (Rosyid, 2008: 192). Ini artinya mereka tetap menjalani apa yang dipercayainya walaupun pemerintah tidak mengakui agama mereka.

Agama sebagai sistem budaya yang bersifat kognitif, meliputi unsur pokok yang di dalamnya terdapat pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma, dan pengawasan terhadap sistem nilai. Agama juga diadakan untuk menghadapi tantangan global yang mengarah kepada kebobrokan sistem nilai masyarakat. Agama telah dikonstruksi dengan sedemikian rupa sehingga harus bersifat religius. Banyak agama memiliki tuhan, entah itu satu tuhan atau banyak tuhan. Tetapi dalam masyarakat Samin nuansa religius itu sama sekali tidak tercermin dalam agamanya. Fauzan mengatakan bahwa pengertian agama masyarakat Samin sama sekali berbeda dengan konsepsi umum. Ketiadaan unsur religius dalam pengertian agama Adam membuat banyak pengamat mengatakan bahwa masyarakat Samin tidak percaya pada bentuk ketuhanan (Fauzan, 2005: 97).

Kebebasan yang ada pada masyarakat Samin bukanlah arti kebebasan yang semena-mena dalam kehidupan beragama. Masyarakat Samin mampu menjadi subjek yang dalam hal ini

mampu menentukan pilihan mereka. Mereka mampu berdikari tanpa harus ada perintah dari pihak luar.

Walaupun pada saat sekarang masyarakat Samin telah banyak yang mulai mengikuti aturan pemerintah tetapi ajaran agama mereka tetaplah mencerminkan bahwa mereka harus mandiri dan bebas untuk menjadi ‘bebas’.

2. Kebebasan dalam Bermasyarakat

Hidup bermasyarakat tidak bisa terelakkan dari kehidupan manusia. Masyarakat terbentuk bukan menunjukkan kekurangan dan kebutuhan dalam hidup tetapi terbentuk dari akar sumbernya yaitu pada kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Adanya masyarakat bermula dari kesadaran akan ‘aku’ yang mengaku ‘yang lain’ yang saling berhubungan timbal balik dengan saling memberi arti dan nilai (Siswanto, 2008: 29).

Masyarakat memiliki suatu bentuk sosietas manusia yang secara prinsipil dapat dikategorikan menjadi lima kelompok, yaitu, kelompok keluarga, kelompok negara, kelompok budaya, kelompok religi, serta kelompok bebas. Setiap bentuk sosietas ini memiliki keunikan tersendiri dan setiap kelompok itu tidaklah sama dengan kelompok yang lainnya (Siswanto, 2008: 41).

Masyarakat Samin merupakan salah satu bentuk sosietas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kelompok ini memiliki kekhasan sendiri dalam menjalani kehidupannya. Aturan-aturan dalam berkehidupan mereka berbeda dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Inti dari ajaran pada masyarakat Samin adalah mereka berusaha untuk berlaku jujur dan menghormati orang lain. Di sinilah letak kebebasan yang ada pada masyarakat Samin.

Salah satu bentuk kebebasan mereka adalah berusaha melakukan resistensi terhadap aturan-aturan luar yang berusaha masuk dalam kehidupan masyarakat Samin. Bentuk resistensi ini berbagai macam, salah satunya mereka tidak menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah formal. Menurut mereka ajaran secara lisan dari orang tua itu sudah cukup sebagai bekal dalam berkehidupan. Penggunaan bahasa juga merupakan suatu bentuk perlawanan masyarakat Samin. Mereka tidak mau terkungkung oleh tingkatan-tingkatan sosial pada penggunaan bahasa, mereka menolak untuk berbahasa Jawa *krama*, dan memilih untuk menggunakan bahasa Jawa *ngoko*.

D. Perbandingan Pandangan Jean Paul Sartre dengan Saminisme tentang Kebebasan

1. Persamaan Pemikiran Jean Paul Sartre dengan Saminisme tentang Kebebasan

Manusia bukan saja merupakan hasil dari pengaruh lingkungan, melainkan memberi struktur kepadanya, dan situasinya. Apa yang ia perbuat dan apa yang terdapat dalam lingkungan semuanya tergantung kepada kebebasannya. Lingkungan manusia adalah manusia sendiri yang membuatnya. Manusia sendiri mengaktualisasikan potensi kebebasannya dalam rangka memberikan warna. Manusia bebas memilih mana yang menurutnya baik (Muzairi, 2002, 160).

Masyarakat Samin memiliki aturan sendiri dalam kehidupannya dan itu berbeda dengan masyarakat lainnya yang ada di Indonesia. Ajaran yang turun temurun menjadi patokan berkehidupan telah menjadi tradisi. Kehidupan mereka memang dianggap “nyeleneh” oleh banyak orang tetapi bagi mereka sendiri ajaran itulah yang benar.

Pada awalnya, Ki Samin Surosentiko menentang pemerintah kolonial Belanda yang memberlakukan pajak dan tanam paksa bagi masyarakat. Ki Samin merasa bahwa aturan ini merampas kebebasannya sebagai manusia. Hal ini terus tertanam dalam tradisi masyarakat Samin yang merasa dirinya bebas menentukan sikap dalam berkehidupan. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda merupakan suatu usaha untuk menjadikan manusia bebas. Manusia diciptakan setara, tidak ada hak untuk mengungguli satu di atas yang lain, maka mereka menolak adanya perbedaan status dalam masyarakat dan menolak adanya penajahan. Mereka tidak mengakui jabatan struktural dan hierarki sosial, yang salah satunya diekspresikan dengan menolak berbahasa *krama* (bahasa Jawa halus) dan saling menyebut sesamanya dengan panggilan "*sedulur*" (saudara). Begitu pula yang terjadi sekarang ini, penolakan-penolakan masyarakat *Sikep* terhadap simbol-simbol negara merupakan salah satu bentuk aktualisasi kebebasan manusia. Upaya-upaya perlawanan atas hegemoni negara dianggap sebagai antisosial. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Samin. Bentuk-bentuk perlawanan mereka dengan melaksanakan kehidupannya dengan cara mereka sendiri dianggap oleh pemerintah sangat mengganggu pelaksanaan kehidupan bernegara (Ma'ruf, 2002: 127). Terlepas dari segala kontroversi yang ada, sebenarnya sikap hidup

masyarakat Samin ini sangat menarik untuk dikaji di dalam ranah perbincangan ilmu filsafat, khususnya menyangkut pandangan eksistensialisme. Kaitannya dengan hal tersebut, ada beberapa sikap dari masyarakat Samin yang relevan atau memiliki titik singgung, dalam hal ini persamaan, dengan salah satu tokoh eksistensialisme yang telah dibicarakan sebelumnya, yakni Jean Paul Sartre. Ada setidaknya dua persamaan antara sikap hidup masyarakat Samin dengan pemikiran Jean Paul Sartre mengenai kebebasan. Pertama adalah menyangkut pemahaman keduanya mengenai kebebasan dan tanggung jawab; dan kedua adalah menyangkut pandangan mengenai agama dan Tuhan.

Berbicara tentang persoalan yang pertama, yakni persoalan kebebasan dan tanggung jawab, keduanya ibarat dua sisi dari mata uang yang keberadaannya saling mengandaikan. Manusia tidak lepas dari tanggung jawab karena dalam pemenuhannya kodrat manusia, ia memilih untuk berbuat sesuai dengan pilihannya dan itu menuntut kebebasan. Salah satu aspek tanggung jawab adalah kemerdekaan. Henri Bergson menjelaskan kemerdekaan sebagai kenyataan yang terdapat di antara kenyataan-kenyataan yang dapat dibuktikan. Kesadaran akan tanggung jawab itu berarti orang sadar akan kemerdekaannya, sadar bahwa ia bisa berbuat jika mau dan bisa tidak berbuat jika tidak mau. Bila manusia berhadapan dengan perbuatan yang tidak baik, manusia dihadapkan pada dua pilihan, manusia mengerti bahwa ia bisa berbuat atau tidak berbuat. Tetapi ia harus melakukan karena itu sesuai dengan kodratnya. Jadi arti dari tanggung jawab adalah seseorang sanggup mempergunakan kemerdekaannya hanya untuk melakukan kebaikan (Salam, 1985: 118).

Menurut Sartre, manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, apapun makna yang hendak diberikan kepada eksistensinya itu. Sebab dalam membentuk dirinya sendiri itu, manusia mendapat kesempatan untuk tiap kali memilih apa yang baik dan apa yang kurang baik baginya. Menurut Sartre apapun pilihan yang diambil oleh manusia sebagai pribadi, pada akhirnya merupakan keputusan yang sebenarnya menyangkut seluruh kemanusiaan karena meskipun sesuatu pilihan itu dibuat atas dasar pertimbangan-pertimbangan pribadi, namun sebenarnya tindakan memilih itu didasarkan pula pada suatu *image* tentang manusia pada umumnya sebagai pribadi yang dicita-citakan. Oleh karena itu, tanggung jawab yang menjadi beban kita jauh lebih besar daripada sekedar tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tanggung jawab

itu juga meliputi tanggung jawab kita terhadap seluruh manusia. Ini berarti bahwa dengan menjatuhkan suatu putusan dalam memilih, saya bertanggung jawab bagi diri saya sendiri maupun bagi setiap orang lain. Saya menciptakan gambaran tertentu tentang manusia atas dasar pilihan saya sendiri. Ketika memilih bagi diri sendiri, saya memilih bagi manusia (Hasan, 1973:104).

Setiap individu harus berusaha memungkinkan serta merencanakan kehidupan manusiawi. Sartre ingin menciptakan suatu moral manusiawi yang baru karena setiap individu manusia terikat dengan orang lain, sehingga kebebasannya harus juga memperhitungkan kebebasan orang lain itu. Seseorang tidak boleh membuat kebebasannya menjadi tujuan tanpa serentak juga membuat hal yang sama dengan kebebasan orang lain. Di sinilah letak tanggung jawab pribadi dalam kehidupan bersama dalam pandangan Sartre. Sartre mengungkapkan:

“Inilah maksud saya ketika saya mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk mengalami kebebasan. Ia dikutuk karena ia tidak menciptakan dirinya sendiri, meskipun ia bebas melakukannya. Ia dikutuk semenjak manusia dilemparkan ke dalam dunia di mana ia harus bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan” (Sartre, 2002:58).

Tanggung jawab adalah kunci dari kebebasan yang ditawarkan oleh Sartre. Kebebasan, meskipun demikian, tidak tanpa tanggung jawab. Sartre mengatakan bahwa kebebasan mengindikasikan tanggung jawab. Artinya, harus ada pengakuan batin ”sayalah” pelaku yang mewujudkan situasi, dunia, dan nilai-nilai.

Pandangan inilah yang menjadi persamaan antara pandangan Sartre dan Saminisme mengenai kebebasan. Sartre berpendapat bahwa kebebasan memerlukan tanggung jawab begitu juga dalam Saminisme. Masyarakat Samin menganggap bahwa kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab. Tanggung jawab harus ada dalam setiap kebebasan karena pilihan, telah dipilih secara sadar sehingga setiap individu harus menerima konsekuensi atas apa yang telah dilakukannya itu.

Kebebasan masyarakat Samin yang berupa prinsip hidup yang menjadi pilihan sendiri oleh masyarakat Samin bukan berarti tanpa tanggung jawab, sebagaimana Sartre yang mengatakan bahwa kebebasan mengindikasikan tanggung jawab. Nilai kebebasan

terletak dalam penolakan terhadap kesewenangan kekuasaan. Pembatasan terhadap hak manusia untuk bertindak, yang merupakan hakikat hukum, justru menjamin kebebasan manusia dari pembatasan-pembatasan yang sewenang-wenang. Nilai kebebasan memuat pengakuan bahwa pembatasan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang (Siswanto, 2008: 75). Dalam konteks sejarah, munculnya golongan masyarakat Samin adalah sebagai bentuk resistensi melalui gerakan sosial terhadap kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Bentuk resistensinya pun bukan dalam bentuk kekerasan. Perlawanan masyarakat Samin dalam bentuk sikap yang jujur dan sederhana adalah suatu bentuk tanggung jawabnya dalam melaksanakan kodrat manusia.

Kejujuran dan kesederhanaan ini terus terwarisi dalam tradisi masyarakat Samin. Pilihan hidup masyarakat Samin untuk memilih menjalani aturan yang mereka buat sendiri adalah bentuk kesadaran mereka terhadap kebebasan yang dimiliki setiap manusia untuk menentukan garis hidupnya. Seperti yang dijelaskan di atas, kebebasan manusia menurut Sartre mencakup semua cita-cita tentang manusia karena dengan memilih untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan dirinya maka akan menciptakan suatu gambaran manusia atas pilihannya. Masyarakat Samin berlaku jujur dan sederhana menginginkan bahwa cita-cita kehidupan manusia adalah hidup dalam kesejahteraan umum dengan tanpa adanya penekanan atas hak manusia. Contoh yang bisa dilihat adalah dalam masyarakat Samin tidak ada bentuk pelanggaran hukum. Pencurian bisa dikatakan tidak ada dalam masyarakat Samin.

Menurut Sartre seseorang bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Ia sadar akan apa yang dipilihnya, sehingga bisa disebut sebagai bentuk iman yang baik (*good faith*). Sebaliknya, jika seseorang melarikan diri dari tanggung jawab perbuatan itu merupakan bentuk iman yang buruk (*bad faith*). Bentuk tanggung jawab dari kebebasan masyarakat Samin adalah sadar atas apa yang telah dilakukan dalam kehidupannya, yang dalam hal ini merupakan pilihannya sendiri untuk menuju kebaikan tanpa adanya penekanan terhadap kebebasan orang lain. Karena pelaksanaan kebebasan diri sendiri harus diiringi dengan pelaksanaan kebebasan orang lain.

Masyarakat Samin yang melaksanakan prinsip hidupnya berdasarkan kehendaknya tanpa bersumber dari pihak lain sebagai pemenuhan kebebasan manusia, serta sikap menerima konsekuensi yang terjadi pada dirinya sendiri sebagai wujud tanggung jawabnya,

merupakan bentuk *good faith* dalam kerangka kebebasan dan tanggung jawab menurut Sartre.

Persamaan pemikiran Sartre dengan pemahaman masyarakat Samin juga terdapat dalam pandangan keduanya mengenai agama dan Tuhan. Masyarakat Samin juga mempunyai agama meskipun agama di sini bukan agama yang bersifat religius melainkan agama yang lebih bersifat sebagai pegangan hidup. Mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Tuhan itu tidak ada, yang ada hanyalah ucapan tentang adanya Tuhan sehingga menurut orang Samin, Tuhan akan menguasai menurut kehendak manusia. Misalnya, manusia menghendaki kebaikan maka Tuhan akan memberikan kebaikan, jika manusia menghendaki kejelekan maka Tuhan pun akan memberikan kejelekan. Tuhan tidak mampu memberi tanpa adanya keputusan dari manusia (Nurrudin dkk, 2003: 81). Makna Tuhan di sini bukanlah Tuhan yang menciptakan, tetapi Tuhan yang hanya sekedar ucapan. Di dalam ajaran Samin Tuhan itu merupakan orangtua dalam keluarga. Jadi konsep Tuhan masyarakat Samin sama sekali berbeda dengan konsep Tuhan di agama pada umumnya.

Pandangan Samin ini, sama seperti pandangan Sartre yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Manusia mengada karena ia menciptakan dirinya sendiri. Bahkan secara ekstrim Sartre mengatakan manusia berusaha menjadi Tuhan. Manusia adalah makhluk tertinggi dan memiliki otoritas dalam memberlakukan aturan-aturan moral dalam kehidupannya (Martin, 2001: 32). Ajaran Samin yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, dalam perspektif pemikiran Sartre merupakan sebuah kebebasan manusia. Jika Tuhan ada maka manusia itu tidak akan bebas. Apabila Tuhan maha mengetahui segala-galanya sebelum manusia melakukan sesuatu, tidak ada peluang lagi bagi kreativitas kebebasan. Pengakuan akan Tuhan berarti mengakui akan manusia yang diobjekkan karena Tuhan adalah sesuatu yang absolut sebagai subjek yang tidak bisa diobjekkan (Martin, 2001: 47).

Perasaan kecewa masyarakat Samin terhadap berubahnya konsep *kawula gusti* kemudian memunculkan hasrat akan internalisasi *gusti* (Tuhan) secara sempurna ke dalam diri tiap individu (*kawula*), sama seperti halnya Sartre yang mengatakan bahwa manusia mempunyai keinginan untuk menjadi Tuhan yang memiliki aturan-aturan moral sendiri (Fauzan, 2005: 86). Tradisi yang ditanamkan dalam sekolah nonformal, dalam hal ini keluarga, dengan model lisan dan figur memunculkan sosok idola sebagai

kekuatan agung yakni orangtua.

Agama menunjukkan arti ibadah yang berasaskan pada ketundukan, rasa takut, dan hormat. Menurut Cicero agama adalah anutan yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Menurut Herbert Spencer faktor utama dalam agama adalah iman, adanya kekuasaan tak terbatas atau kekuasaan yang tidak bisa digambarkan batas waktu atau tempatnya. Sementara itu Max Muller berpendapat bahwa agama pada intinya adalah untuk menyatakan apa yang mungkin digambarkan, dan mengenal Tuhan merupakan kesempurnaan mutlak yang tiada terbatas. Agama yang dibicarakan di dalam semua pendapat tersebut adalah agama yang bertendensikan agama wahyu (Rosyid, 2008: 198).

Pandangan ini berbeda dengan konsep keagamaan masyarakat Samin. Agama masyarakat Samin (Agama Adam), tidak lebih dari kebudayaan yang mengedepankan aspek sistem tingkah laku karena ajarannya bermuatan konsep etika. Pandangan mereka tentang agama ibarat sebuah “baju” yang akan menutupi tubuh agar tampak lebih baik dalam kehidupan. Agama masyarakat Samin, dilihat dari perspektif pemikiran Sartre, merupakan suatu pilihan hidup yang harus dijalani dengan dasar kebebasan tanpa adanya batasan-batasan dari Tuhan. Manusia itu sendiri merupakan penentu nilai-nilai moral yang ada di kehidupan. Beragama tidak lain merupakan sebuah tindakan manusia yang bebas untuk memilih jalan mereka sendiri, dan oleh mereka sendiri sesuai dengan yang diyakini. Norma dan moral diciptakan oleh kebebasan manusia sendiri. Moral tidak memiliki dasar kecuali dalam kebebasan. Kebebasan itulah nilai satu-satunya bagi Sartre. Kebebasan manusia dan tuntutan agar ia hidup secara autentik dengan demikian adalah nilai yang diyakini oleh Sartre (Siswanto, 2001:102).

Agama bukan merupakan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Tetapi agama merupakan suatu aturan yang dibuat oleh manusia sendiri sebagai kontrol sosial agar terjadi suatu kehidupan yang teratur dalam hubungan dengan manusia lain. Masyarakat Samin memiliki ajaran berupa *agama iku gaman, adam pengucape, man gaman lanang* yaitu agama merupakan senjata hidup yang terkodifikasi berupa prinsip hidup. Namun seiring terjadinya proses benturan dengan budaya luar, para generasi muda masyarakat Samin telah menganut agama yang diakui oleh pemerintah. Hanya sebagian saja yang tetap berkeyakinan tentang sikap tidak mempercayai Tuhan, dalam hal ini kalangan tua masyarakat Samin. Meski demikian, ajaran-ajaran prinsip hidup

tetap menjadi pegangan yang kuat dalam masyarakat Samin.

Terlepas dari ada atau tidaknya penganut Samin yang memeluk agama yang diakui pemerintah, mereka tetap melaksanakan agama Adam yang tanpa pengakuan mengenai Tuhan, dalam konsep Tuhan Yang Maha Esa. Inti dari kehidupan beragama masyarakat Samin adalah kekuatan individu dalam menentukan pilihan hidup. Jika seseorang melaksanakan prinsip hidupnya atas pilihannya sendiri dengan sadar orang itu pun dianggap sudah beragama. Masyarakat Samin menganggap semua agama bertujuan baik. Jika sebagian masyarakat Samin memilih untuk beragama yang diakui oleh pemerintah itu adalah pilihan mereka sendiri dan mereka bertanggung jawab atas pilihannya sendiri.

2. Perbedaan Pemikiran Sartre dengan Saminisme tentang Kebebasan

Masyarakat Samin dalam bermasyarakat selalu berlaku sederhana, seakan tidak mempedulikan orang di sekitarnya. Mereka seakan semena-mena dalam melakukan sesuatu. Ini merupakan bentuk kebebasan mereka. Mereka berhak menentukan pilihan yang menurut mereka baik. Contohnya, mereka merasa tidak perlu menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah formal karena mereka merasa sekolah formal akan membuat anak mereka terpengaruh dengan budaya luar. Selain itu, mereka yakin bahwa bentuk pendidikan melalui keluarga sudah tepat. Begitu juga dengan salah satu ajaran masyarakat Samin, *aja drengki, tukar padu, mbadhog colong* (jangan dengki dan iri, bertengkar, makan yang bukan hak, dan mencuri). Ungkapan ini mengajarkan kepada mereka agar berusaha untuk tidak menekan orang lain karena kebebasan mereka akan terampas. Manusia sepenuhnya bebas atas pilihannya sendiri. Tidak ada aturan dari pihak luar yang berlaku bagi dirinya. Sehingga yang ada hanyalah kekuasaan atas diri sendiri. Hidup seorang manusia, manusia itu sendiri yang menjalani dan dia harus bertindak sesuai dengan apa yang menurutnya baik.

Berkuasanya kembali individu atas dirinya sendiri sekaligus menegaskan prinsip berpegang pada kekuatan dan usaha sendiri, serta prinsip menghargai hak orang lain. Bisa dipahami bahwa larangan-larangan yang dipegang oleh masyarakat *Sikep*, seperti *drengki, srei, dahwen, panasten*, dan *kemeren* adalah wujud dari pemahaman mereka mengenai tindakan “tidak berhak atas orang lain”. Bagi pandangan Sartre ini merupakan suatu usaha untuk menyatakan eksistensi diri.

Manusia memiliki kemerdekaan untuk membentuk dirinya dengan kemauan dan tindakannya. Situasi manusia mungkin tak mengandung arti, tak masuk akal, (*absurd*) dan tragis, tapi ia masih dapat hidup dengan aturan-aturan integritas, keluhuran budi, dan keberanian. Ia dapat membentuk suatu masyarakat manusia, karena takdir manusia itu berada di tangan ia sendiri (Titus, 1984: 397). Masyarakat Samin muncul karena adanya keinginan untuk menentukan pilihan hidup tanpa adanya tekanan atas aturan-aturan yang mengekang kehidupan atas kemauan diri sendiri. Pengutamaan atas individu menjadi bentuk penolakan terhadap otoritas manusia lain atas dirinya.

Hubungan dengan orang lain menjadi titik perbedaan pemikiran Saminisme dengan Sartre. Masyarakat Samin menganggap bahwa hubungan dengan orang lain dilakukan dengan cara menghormati dan tidak menganggap orang lain sebagai objek. Hal ini berbeda dengan Sartre, karena bagi Sartre hubungan dengan orang lain merupakan konflik. Masing-masing individu berusaha saling mengobjekkan. Sebagai contoh pada wujud relasi antarmanusia menurut Sartre, dalam sikap acuh tak acuh, setiap manusia dapat membangun subjektivitasnya dan menghilangkan subjektivitas orang lain. Saminisme memiliki pemahaman yang berbeda karena dalam Saminisme, manusia memang dapat membangun subjektivitasnya tetapi tidak bisa menghilangkan subjektivitas orang lain. Sikap cinta, menurut Sartre merupakan penipuan sedangkan dalam Saminisme sikap cinta menjadi penting dalam membangun keluarga.

Menurut Rosyid, ajaran Samin dilaksanakan dengan menekankan pada ajaran perilaku budi pekerti yang bersifat horizontal (hubungan manusia dengan manusia), dan berpegang pada prinsip hidup. Saminisme yang selama ini dianggap sebagai budaya warisan yang bernuansa negatif ternyata memiliki pesan etika yang luhur untuk dimiliki oleh semua orang karena mereka memiliki pesan tertinggi berupa prinsip hidup yang mengedepankan norma etika kemanusiaan. Masyarakat Samin layak dijadikan sebagai teladan bagi manusia dalam hal semangat kerja dan melaksanakan prinsip hidup yang luhur (Rosyid, 2008: 232).

Ajaran yang bersifat horizontal sebagai bentuk dari pelaksanaan kebebasan yang tanpa mengurangi kebebasan manusia adalah: pertama, ikhlas, dalam hubungan dengan orang lain masyarakat Samin tidak mengharapkan imbalan karena manusia dengan yang lain adalah sama. Manusia yang satu tidak

menganggap manusia lain sebagai objek; kedua, *nrima*, masyarakat Samin berprinsip, *kono-kono, kene-kene*, maksudnya, apa yang diperbuat orang lain itu haknya dan tidak perlu mengikutinya juga tidak perlu menggangukannya; dan *ketiga*, tidak ingin merugikan siapapun (Rosyid, 2008: 211).

Setiap manusia sejalan dengan keunikan dan kekhasannya sebagai pribadi. Ia juga makhluk yang memiliki kebebasan sehingga semestinya tidak larut begitu saja terhadap berbagai pandangan yang ada. Namun kita pun juga harus sadar bahwa keberadaan sebagai pribadi ada dalam kebersamaan, atau dalam bentuk sosietas tertentu. Oleh karena itu, setiap manusia dalam masyarakat juga harus seirama dengan dasar hubungan individu dan kelompok yang dipilih oleh sosietas itu agar tujuan bersama yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik (Siswanto, 2008: 67).

Masyarakat Samin, dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berusaha untuk menghormati orang lain sebagai wujud tanggung jawab manusia akan kebebasannya dalam pemenuhan tujuan bersama. Sartre menjelaskan bahwa kebersamaan dan hubungan orang lain merupakan unsur mutlak dalam hidup manusia. Manusia dalam kesadaran dan kebebasannya senantiasa akan berhadapan dengan orang lain. Manusia memerlukan manusia lainnya untuk mengerti sepenuhnya struktur dan cara kita berada terhadap orang lain. Namun hubungan tersebut merupakan konflik karena manusia yang satu berusaha untuk menjadikan objek bagi yang lain. Saminisme, dalam hal ini berbeda dengan pandangan Sartre karena masyarakat Samin tidak menginginkan pengobjekan atas manusia lain. Karena pada dasarnya manusia masing-masing memiliki kebebasannya dalam menentukan pilihan secara sadar, jadi pengobjekan atas manusia lain merupakan pengingkaran atas kebebasan manusia secara utuh. Hubungan dengan orang lain yang diinginkan masyarakat Samin adalah hubungan yang saling menghormati sebagai sesama manusia.

Masyarakat Samin tidak mengingkari perlunya hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan dengan orang lain diperlukan untuk eksistensi diri. Tetapi masing-masing individu bebas dalam menentukan aturan-aturan hidupnya tanpa adanya tekanan dari orang luar. Jadi antar manusia tidak berhak untuk mengatur manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat Samin tidak berusaha untuk mengungguli masyarakat, juga mengeksploitasi masyarakat Samin lainnya. Karena semua mempunyai aturan-aturannya

masing-masing yang telah dipilih sehingga tidak ada ikatan aturan manusia yang satu dengan manusia lainnya.

E. Penutup

Saminese merupakan ajaran yang mengutamakan kehidupan yang adil dan jujur. Manusia Samin mampu memanfaatkan potensi mereka sehingga ajaran yang mereka yakini bisa berkembang menjadi ajaran yang penuh keberanian dan kreativitas.

Kebebasan dalam pemahaman masyarakat Samin ini, pada awalnya dapat dimaknai dengan otonomi dalam arti tanpa adanya paksaan. Ketika pemerintah kolonial Belanda memberlakukan pajak, masyarakat Samin merasakan bahwa pajak merupakan sebuah paksaan dan tekanan. Hal itu membuat kebebasan mereka terbelenggu sehingga kemudian terjadi perlawanan terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa sekarang kebebasan masyarakat Samin lebih dimaknai sebagai otonomi manusia yang berdiri sendiri, yaitu ketika manusia dapat menentukan hidupnya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak luar, dan manusia itu juga sadar akan apa yang ia lakukan. Sebagai subjek, manusia berdiri dengan pendirian dan sikap. Pendirian dan sikap itu direncanakan dan dapat dianalisa sehingga dapat dirubah sewaktu-waktu. Melalui pemahaman kebebasan yang seperti ini, konsep kebebasan yang diinginkan masyarakat Samin sesuai dengan konsep kebebasan yang disampaikan oleh Sartre, yakni bahwa takdir manusia itu berada di tangan ia sendiri.

F. Daftar Pustaka

- Adian, Donny Gahral, 2006, **Percik Pemikiran Kontemporer (Sebuah Pengantar Komprehensif)**, Jalasutra, Yogyakarta.
- Bertens, K., 2006, **Filsafat Barat Kontemporer Prancis**, Gramedia, Jakarta.
- Dister, Nico Syukur, 1988, **Filsafat Kebebasan**, Kanisius, Yogyakarta.
- Fauzan, M. Uzair, 2005, **Representasi Politik dan Wacana Multikulturalisme**, dalam buku Hak Minoritas, Insist, Yogyakarta.
- Hasan, Fuad, 1973, **Berkenalan Dengan Eksistensialisme**, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Ma'ruf, Ade dan Anas Syahrul Alimi, 2002, **Soliloqui, Pemikiran**

- Filsafat, Agama, dan Politik**, Jendela, Yogyakarta.
- Martin, Vincent, 2001, **Filsafat Eksistensialisme; Kierkegaard, Sartre, Camus**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mirzah, Harum, 1989, **Gerakan Saminisme**, Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Mumfingati, Titi, 2004, **Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora, Jawa Tengah**, Jarahnitra, Yogyakarta.
- Muzairi, H., 2002, **Eksistensialisme Jean Paul Sartre (Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia)**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurrudin dkk, 2003, **Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger**, LKIS, Yogyakarta.
- Rosyid, Moh., 2008, **Samin Kudus**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salam, Burhanuddin, 1985, **Filsafat Manusia (Antropologi Metafisika)**, Bina Aksara, Jakarta.
- Sartre, Jean Paul, 2002, **Eksistensi dan Humanisme**, Penerjemah; Yudhi Murtanto, Penyunting; Kamdani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siswanto, Dwi, 2001, **Humanisme Eksistensial Jean Paul Sartre**, Philosophy Press, Yogyakarta.
- _____, 2008, **Orientasi Pemikiran Filsafat Sosial**, Penerbit Lima, Yogyakarta.
- Titus, Smith, Nolan, 1984, **Living Issues In Philosophy (persoalan-persoalan Filsafat)**, Edisi ke-7, alih bahasa; Prof. Dr. H.M. Rosjidi, Bulan Bintang, Jakarta.
- Widodo, Amrih, 1997, *“Samin In The New Order: The Politics Of Encounter And Isolation”*, dalam Jim Schiller dan Barbara Martin-Schiller, **Imagination Indonesia: Cultural Politics and Political Culture**, Ohio University Press. Ohio.